

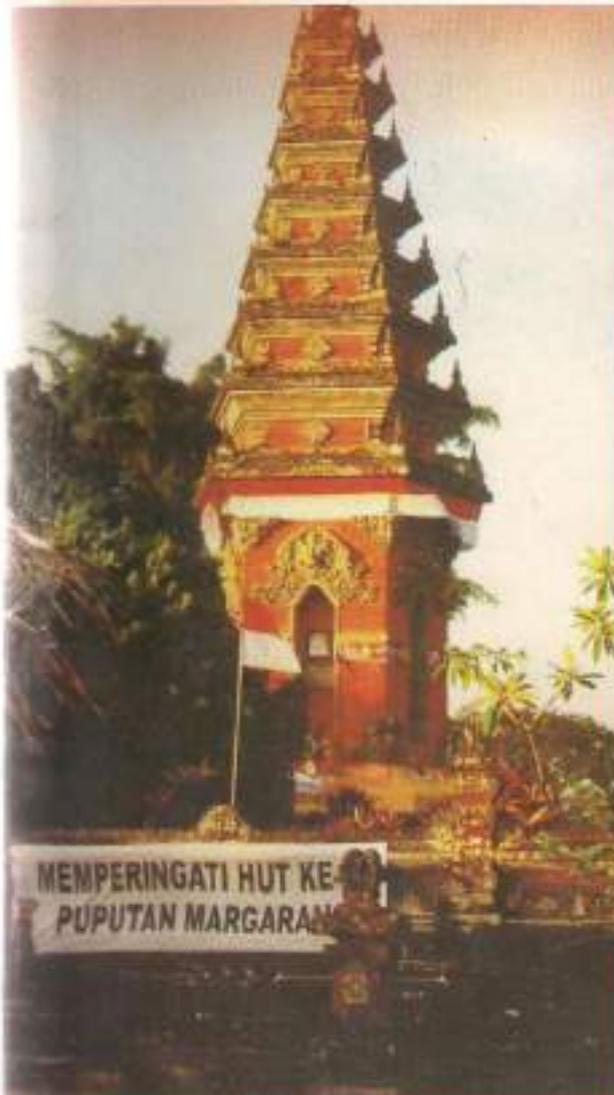
ISSN : 1907 - 9184

01.416.3).4

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SINAR MAS

VOLUME II, NO 1, NOVEMBER 2010



Reformasi Birokrasi Menuju
Pelayanan Prima

Kesadaran Hukum dalam Kaitannya
dengan Kewibawaan Hukum

Kontribusi Tingkat Pendidikan,
Pengalaman dalam Pelatihan,
dan Penguasaan dalam Bidang
Supervisi Pengajaran Terhadap
Kualitas Unjuk Kerja Kepala Sekolah
Sebagai Supervisor Pada SMA/SMK di
Kabupaten Tabanan

Peranan Kontrak
dalam Kegiatan Bisnis

Pendidikan Seks Bagi Remaja

Studi Kasus Pemberdayaan Modal
Budaya Desa Adat Kuta
Dalam Hegemoni Politik Pariwisata

Pengembangan *Soft Skills*
untuk Meningkatkan
Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi

Sinergitas *Good Governance* dalam
Pembangunan daerah : CSR sebagai
Salah Satu Partisipasi *Private Sector*

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISIP) Margarana Tabanan

III.A.1.b.3).4

ISSN 1907 - 9184

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SINAR MAS

VOLUME II, No. 1, Nopember 2010

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
(STISIP) MARGARANA - TABANAN
2010

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| Pengantar Redaksi | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Prima | |
| Oleh : Drs. I Wayan Madra Suartana, M.Si | 1-6 |
| Kesadaran Hukum dalam Kaitannya dengan Kewibawaan Hukum | |
| Oleh: I Gst. Ngr. Ag. Bgs. Widiana, SH, MH | 7-15 |
| Kontribusi Tingkat Pendidikan, Pengalaman dalam Pelatihan, dan Penguasaan dalam Bidang Supervisi Pengajaran Terhadap Kualitas Unjuk Kerja Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Pada SMA/SMK di Kabupaten Tabanan | |
| Oleh Drs. I Wayan Suwira, M.Si, M.Pd | 16-20 |
| Pernan Kontrak dalam Kegiatan Bisnis | |
| Oleh Luh Putu Sridanti , SH, MH | 21-34 |
| Pendidikan Seks Bagi Remaja | |
| Oleh Oleh Drs. I Made Murdika, M.Si | 35-42 |
| Studi Kasus Pemberdayaan Modal Budaya Desa Adat Kuta Dalam Hegemoni Polink Pariwisata | |
| Oleh Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.par. | 43-55 |
| Pengembangan <i>Soft Skills</i> untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi | |
| Oleh I Made Nuryata | 56 - 63 |
| Sinergitas <i>Good Governance</i> dalam Pembangunan Daerah : CSR sebagai Salah Satu Partisipasi <i>Private Sector</i> | |
| Oleh I Wyn Wiasthana Ika Putra..... | 64 - 70 |

Cover depan:

Candi Taman Makam Pahlawan Margarana, Tabanan

Cover belakang: Berbagai kegiatan Sivitas Akademika STISIP Margarana Tabanan

STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MODAL BUDAYA DESA ADAT KUTA DALAM HEGEMONI POLITIK PARIWISATA

Oleh Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par

ABSTRACT

Government policy on tourism in national development by exploiting the cultural capital of each ethnic group in Indonesia, each region such as race utilize local wisdom into tourism attraction. To legitimize the action, each local government given the freedom to make political policies or local regulations (Perda) to the successful development of tourism. In Bali for example, cultural capital of Hinduism is imbued as a tourist attraction is set by "Perda No. 1 Tahun 1974", later amended to become "Perda No. 1 Tahun 1991" on Cultural Tourism. In this legislation mentioned Cultural Tourism is the type of tourism development in the development and use of local Balinese culture is imbued with Hinduism, which is part of the National Culture as a potential basis of the dominant, in which one dream implied the existence of reciprocal relationships between tourism with culture so that both increases in harmony, harmony, and balance. Operation of cultural tourism is to introduce, utilize, conserve and enhance the quality of objects and attractions, to maintain the norms and values of religious culture and natural life of Bali an environmentally sound life, prevent and eliminate the negative influences that can be caused by activities tourism.

With the enactment of such legislation, like the opinion of Gramsci, hegemony, and indeed there has been domination of the state of the diversity of culture and life of the community. This phenomenon is also in line with the perspective of cultural studies reinforced the thought leaders Postmodern theory and critical social theory, like Foucault on the discourse of power, knowledge, and truth, Derrida on deconstruction, which reject the grand narratives Lyotard, Bourdieu on cultural capital, or Baudrillard which confirms the occurrence of big change from the model of mechanical, metallurgical production to an information industry and from production to consumption as the main focus of economic

Key Words: Cultural Capital, Hegemony, Traditional Village, Tourism Policy

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan aset utama kepariwisataan Indonesia, karena sifatnya yang unik dan khas. Hal ini ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, khususnya pada Bab Sosial dan Budaya, paragraf g dan h, sebagai berikut: (g) Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana yang utuh dan terpadu; (h) Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.

Kebijakan politik pemerintah tentang pengembangan kepariwisataan secara nasional dengan memanfaatkan modal budaya masing-masing etnis di Indonesia, maka setiap daerah seperti berlomba memanfaatkan kearifan lokalnya menjadi daya tarik pariwisata. Untuk melegitimasi tindakan itu, masing-masing pemerintah daerah diberi kebebasan untuk membuat kebijakan politik atau peraturan daerah (Perda) guna menyelesaikan pengembangan pariwisata.

Di Bali misalnya, modal budaya yang dijiwai agama Hindu sebagai daya tarik wisata ditetapkan dengan Perda No. 1 Tahun 1974, kemudian diperbaharui menjadi Perda No. 1 tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. Dalam Perda ini disebutkan Pariwisata Budaya adalah jenis

kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang dominan, yang di dalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang. Penyelenggaraan pariwisata budaya adalah untuk memperkenalkan, melindungi, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup, mencegah dan meniadakan pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan.

Dengan ditetapkannya Perda tersebut, seperti pendapat Gramsci, sesungguhnya telah terjadi hegemoni dan dominasi negara terhadap kebudayaan dan kehidupan keberagaman masyarakat. Fenomena ini sejalan pula dengan perspektif *culture studies* yang diperkuat pemikiran tokoh teori Postmodern dan teori Sosial Kritis, seperti Foucault tentang wacana kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran, Derrida tentang dekonstruksi, Lyotard yang menolak narasi besar, Bourdieu tentang modal budaya, atau Baudrillard yang menegaskan terjadinya perubahan besar dari model mekanis, produksi material ke suatu industri informasi dan dari produksi ke konsumsi sebagai fokus utama ekonomi (Featherstone: 2001, Best: 2002, Ritzer: 2002, Lubis: 2003, Jenkins: 2004, Piliang: 2004, Barker: 2005, Agger: 2006, Harker: 2006, Maryah: 2006, Atmaja: 2007). Kenyataannya implementasi Perda tersebut memang mengindikasikan adanya ketimpangan, tampak menonjol sebagai instrumen politik penguasa, dekonstruksi modal budaya yang lebih menguntungkan kaum kapitalis dan penguasa. Hal ini mudah terjadi karena konsep pembangunan konvensional yang dilaksanakan bersifat *top down*.

Proses pengambilan keputusan yang lebih bersifat *top down* dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam perkembangan pariwisata ternyata gagal melahirkan pemerataan,

Pariwisata dengan sistem kapitalisme global menyebabkan terjadinya marginalisasi terhadap masyarakat lokal yang teguh memegang tradisi serta terbelakang dalam pengetahuan kepariwisataan dan modal ekonomi. Menurut Erawan (2001), Ardika (2002), Pitana dan Putu Gayatri (2005), Picard (2006), Tjatera (2007), manfaat pariwisata terdistribusi secara tidak proporsional terlihat dalam Pertumbuhan ekonomi terjadi sesuai harapan, tetapi hasil ini sebagian besar dinikmati oleh yang memang sudah kuat perekonomiannya, yang lemah tetap lemah, yang miskin tetap miskin dan malahan tidak jarang menjadi bertambah miskin, karena adanya persaingan antara yang kuat dengan yang lemah.

Eksplotasi modal budaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam sektor pariwisata tentu sangat bertentangan dengan esensi pengembangan pariwisata yang menghendaki adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang. Penyelenggaraan pariwisata budaya semestinya mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan dan agama dalam kehidupan masyarakat Bali yang berwawasan lingkungan hidup sesuai konsepsi *Tri Hita Karana*. Pengaruh-pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan kepariwisataan, semestinya dapat dikendalikan oleh nilai moralitas agama dan kebudayaan, namun kenyataannya seperti dikemukakan Abadullah (2006), kontrol sosial di dalam praktik agama menjadi sangat lemah karena batas-batas legitimasi simbolik mengabur, kemudian terjadi "deteritorialisasi", suatu proses penghilangnya batas-batas kebudayaan. Piliang menyebut dengan istilah "posspiritualitas", berbaunya hasrat dan kesucian.

Semua desa di Bali yang terikat dalam sistem sosial budaya yang disebut *desa adat* atau *desa pakraman*, memiliki kearifan lokal dan *local genius* yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa bertahan, tumbuh dan berkembang karena dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati yang disebut *desa mawacara* dan *desa kala patra*. *Desa Adat* Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung misalnya,

memiliki kearifan lokal dan *lokal genius seperti ritual Melasti di pantai* yang menjadi daya tarik wisata. Sebagai destinasi pariwisata yang mengandalkan keindahan pantai, *Desa Adat Kuta* yang terdiri atas 13 *banjar* (organisasi sosial tradisional di bawah *desa adat* yang memiliki otonomi untuk mengatur anggotanya), secara tidak langsung telah memberdayakan modal budayanya dengan *memanage* prosesi ritual *Melasti* itu menjadi daya tarik wisata.

Ritual *Melasti* yang dilaksanakan di Pantai Kuta bisa menjadi daya tarik wisata, karena selain memiliki fungsi religiusitas memancarkan vibrasi kesucian, juga memiliki nilai estetika dalam aspek-aspek ritualnya, sehingga prosesnya tampak sebagai bentuk kesenian sangat spektakuler dan menjadi tontonan wisatawan mancanegara yang sedang beraktivitas di pantai. Pemahaman estetika di sini sejalan dengan pendapat Maquet (1986) tentang pengalaman estetika dalam realitas seni sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari secara tidak disadari kita dikelilingi oleh benda-benda visual bernilai estetika. Fenomena seni yang pada awalnya diciptakan tidak dengan maksud dan tujuan sebagai benda seni melainkan sebagai benda pakai atau fungsional, kemudian menjadi karya seni yang menarik disebut Maquet dengan istilah "*art by metamorphosis*". Karena itu, kesenian dikenal sangat dinamis, fleksibel, dan adaptif terus berubah dan berkembang mengikuti dinamika perubahan masyarakatnya (Dibia: 1994, Soedarsono: 1995) Demikianlah yang terjadi di *Desa Adat Kuta*, prosesi ritual *Melasti* dilaksanakan senja hari menjadi tontonan seni yang menarik, karena pantai Kuta saat itu sedang dipenuhi para wisatawan yang melakukan aktivitas *sun set*, mengintip debur ombak bermahkotakan cahaya kemerahan matahari yang perlahan memasuki peraduannya di ufuk barat.

Hegemoni ideologi kapitalis dalam *tourism market* yang bersinggungan dengan ideologi *desa adat* yang dilandasi *Tri Hita Karana*, melahirkan ekspresi kultural dan tindakan-tindakan sosial yang mencerminkan transformasi sosial budaya. Proses produksi dan reproduksi dalam pemberdayaan ritual *Melasti* sebagai modal budaya *Desa Adat Kuta* di tengah hegemoni

pariwisata, sejalan dengan pendapat Abdullah (2006:47), merupakan proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial sehingga mengharuskan adanya sikap saling beradaptasi antara *krama* (warga) *desa adat* dengan wisatawan yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda, sehingga terjadi transformasi sosial agar terjamin keberlanjutan pariwisata.

Transformasi sosial budaya dalam hegemoni pariwisata ini sangat penting menjadi bahan kajian atau penelitian, karena pada tataran sosial akan terlihat proses dominasi dan subordinasi budaya terjadi secara dinamis seiring perkembangan pariwisata global. Sedangkan pada tataran individual akan dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi identitas kultural *krama desa adat* dalam konteks sosial budaya pariwisata.

Beberapa pertanyaan mendasar patut diperhatikan dalam mengkaji transformasi sosial budaya dalam pemberdayaan modal budaya *Desa Adat Kuta* sebagai daya tarik wisata dalam hegemoni pariwisata menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis kerakyatan, seperti;

- (a) Mengapa *Krama Desa Adat Kuta* tetap bertahan dengan tradisinya dalam hegemoni politik pariwisata?
- (b) Apakah telah terjalin harmonisasi relasi sosial kultural antara *state, society, dan market* dalam pemberdayaan modal budaya menjadi daya tarik wisata di *Desa Adat Kuta*?
- (c) Apakah terjadi transformasi sosial dalam pemberdayaan modal budaya *Desa Adat Kuta* sebagai daya tarik wisata di tengah hegemoni politik pariwisata?

Jawaban atas pertanyaan itu diharapkan dapat menemukan pemahaman baru dalam proses transformasi sosial kultural yang menyangkut bagaimana "kebudayaan asal" direpresentasikan di tengah hegemoni pariwisata. Pemahaman ini akan menjernihkan eksistensi aspek "produktif" kebudayaan yang menitikberatkan kebudayaan sebagai pedoman dalam adaptasi serta kelangsungan hidup *krama Desa Adat Kuta*, dan aspek "reproduktif" kebudayaan yang menjadi

kecenderungan baru dalam perubahan-perubahan masyarakat kontemporer akibat hegemoni ideologi pasar pariwisata.

Asumsinya, dengan adanya pemahaman baru tersebut, akan muncul kesadaran mengendalikan hegemoni dan dominasi kekuasaan politik pengembangan pariwisata yang berorientasi pasar, sehingga kebudayaan tidak kehilangan makna serta tetap menjadi referensi nilai dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, pemahaman ini akan bermuara pada terbangunnya harmonisasi antara *state*, *society*, dan *market* dalam perkembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kerakyatan.

PEMBAHASAN

2.1. Pembangunan Pariwisata Budaya dan Hegemoni Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 1974, yang telah diperbaharui menjadi Perda No. 3 Tahun 1991, kepariwisataan yang dikembangkan di Bali adalah "Pariwisata Budaya". Pariwisata budaya adalah satu jenis kepariwisataan yang dikembangkan bertumpu pada kebudayaan, yaitu kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu. Menurut Lim (1996) dalam Ardika (1999), Pariwisata Budaya dapat didefinisikan secara sempit dan luas. Dalam pengertian yang sempit, pariwisata budaya menyangkut perpindahan orang semata-mata karena motivasi budaya seperti; bepergian untuk tujuan studi, melihat seni pertunjukkan dan budaya, mengunjungi festival, mengunjungi monumen dan peninggalan purbakala, mengunjungi kesenian rakyat dan perjalanan ke tempat suci. Sedangkan dalam pengertian luas, pariwisata budaya menyangkut semua perpindahan orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu yang berbeda, mempertinggi tingkat budaya seseorang, memberi pengetahuan dan pengalaman.

Lester Borley (1996: 181) menyatakan bahwa pariwisata budaya merupakan aktivitas yang memungkinkan wisatawan untuk mengetahui dan memperoleh pengalaman tentang perbedaan cara hidup orang lain, merefleksikan adat istiadatnya, tradisi religiusnya dan ide-ide intelektual yang terkandung dalam warisan budaya yang belum dikenalnya. Dalam konteks ini, Boniface (1995:

115) juga menyatakan, bahwa pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan cara hidupnya serta hasil karyanya, teristimewa hasil pada zaman dahulu.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990, Bab III, pasal 4 disebutkan bahwa objek dan daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna; (2) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. Motivasi pariwisata budaya antara lain: (1) Mendorong pendayagunaan produksi daerah dan nasional; (2) Mempertahankan nilai-nilai budaya, norma, adat-istiadat, dan agama; (3) berwawasan lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial (Sirtha:2001).

Motivasi pariwisata budaya tersebut telah menggerakkan para pelaku pariwisata untuk memperhatikan keberlanjutan usaha pariwisata sebagai bagian dari kehidupannya. Bali tetap mengandalkan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan peluang dan kesempatan kerja, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep pengembangan pariwisata budaya di daerah Bali tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara selaras, serasi dan seimbang.

Dengan memahami kebijakan pengembangan pariwisata budaya maka bisa dilihat bahwa pembangunan pariwisata Bali telah berperan dalam pertumbuhan perekonomian Bali serta mendinamisasikan kehidupan sosial budaya. Bali sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan pariwisata sejak beberapa dasawarsa terakhir. Ekonomi, seperti misalnya mata pencaharian dalam sector pariwisata, sejalan dengan Tjatera (2007), Spillane (1994), sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakat Bali yang terkemas dalam budaya, di mana mata pencaharian tersebut

digeluti, karena masyarakat selalu melakukan adaptasi pada lingkungannya.

Tidak berlebihan rasanya, jika setiap membicarakan Bali, baik dari segi ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, lingkungan dan sumber daya alam atau pembangunan secara umum, pariwisata selalu menjadi "agent" atau "aktor" yang memainkan peranan yang sangat penting. Sebaliknya setiap orang membicarakan pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional, Bali selalu dijadikan acuan, dibahas, dianalisis, dan selalu menjadi *exemplary case* (Pitana: 2000, hal. 4).

Pariwisata memberi dinamika tersendiri dalam perkembangan kebudayaan Bali, seperti dijelaskan Pitana, dengan mengutip pemikiran Wood (1984) dan Picard (1993), di mana untuk melihat pengaruh pariwisata terhadap kebudayaan hendaknya terlebih dahulu disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdeferensiasi, aktif dan selalu berubah. Pendekatan yang lebih realistis adalah dengan menganggap pariwisata dalam "pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat", di mana masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya atau disebut sebagai proses "turistifikasi".

Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu merupakan suatu kebudayaan yang sangat kompleks dan dinamik, seperti dianalogikan James Boon, antropolog Amerika (1997) dalam Pitana (1999), "*Balinese culture is a romance of ideas and action...*". Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai perbedaan dan variasi adat dan budaya masing-masing desa adat yang terakumulasi dalam konsep *desa, kala, patra*. Dalam sejarahnya kebudayaan Bali merupakan suatu sinkretisme antar berbagai unsur kebudayaan dalam perjalanannya ribuan tahun dengan terjadinya kontak antara penduduk Bali dengan dunia luar, seperti Cina, mesir, Jepang, India, dan Eropa. Namun dalam pengambilan unsur-unsur kebudayaan luar itu, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Bali tidak langsung mengambil unsur-unsur luar seutuhnya, melainkan disaring sedemikian rupa dan dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan Bali, sehingga unsur serapan tersebut

tidak kentara dan seakan-akan sudah menjadi "asli" Bali.

Oleh karena itu, industri pariwisata tidak cukup dilihat dari bentuk pembinaan dan pembangunan hotel-hotel, jalan-jalan dan pelbagai alat angkutan serta kemudahan lainnya, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial budaya, yaitu kehidupan adat istiadat yang dijiwai oleh agama Hindu. Ini berarti pariwisata berdampak terhadap sosial budaya cukup besar. Dampak ini bisa dilihat yaitu: dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas termasuk tingkat ekonomi atau ketergantungannya, dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat, dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial, dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata, dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat, dampak terhadap pola pembagian kerja, dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial, dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan, dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial, dampak terhadap kesenian dan adat-istiadat. Berbagai dampak negatif juga terjadi seperti *demonstration effect*, komoditisasi terhadap kebudayaan, penurunan kualitas hasil kesenian, profanisasi kesenian sakral, kegiatan ritual dan tempat suci.

Dalam perkembangan pariwisata Bali dan Kuta khususnya saat ini, di tengah era dari perspektif Posmodernisme, menunjukkan terjadinya transformasi sosial dalam pemberdayaan modal budaya sebagai daya tarik wisata. Ritual *Melasti* yang dilaksanakan di pantai Kuta misalnya, mengalami perubahan fungsi sosial tidak hanya untuk kepentingan sosial religius namun juga sebagai tontonan wisatawan. Estetika seni dalam prosesi *Melasti* tidak hanya sebagai wujud persembahan kepada Sang Hyang Widhi, namun juga mengalami metamorphosis untuk menarik perhatian wisatawan. Relasi sosial cultural ini mengakitnya aspek-aspek agama yang bersifat religius, seperti pendapat Piliang (2004: 321) semakin kental mengalami peribauran "hasrat" dan "kesucian" yang disebut "*Postspiritualitas*". Telah tercipta suatu kondisi dimana yang *Ilahiah* dituliri oleh yang duniawi, yang transenden dimasuki oleh

yang imanen. Ada pencampuran entitas, ada peleburan esensi, ada juga persimpangsiuran nilai, bertumpangtindihnya hasrat rendah dengan kesucian, perbedaan di antara keduanya menjadi kabur.

Dengan terjadinya fenomena "deteritorialisasi" tersebut, yang sangat penting ke depan mendapat perhatian para penguasa dalam berpolitik adalah membangkitkan dan menjaga moralitas kekuasaan politik. Setiap tapal batas, khususnya tapal batas moral harus tetap dijaga. Harus disadari, menurut Pilliang, bahwa ketika batas-batas moral itu dikendalikan oleh politik, batas-batas moral itu terlindas oleh gejolak hasrat politik yang sarat kepalsuan, kesemuan, tipu daya, atau kekerasan. Dalam perspektif politik pengembangan pariwisata yang dikendalikan oleh sistem ekonomi global, maka batas-batas moral terlindas oleh mesin hasrat kapitalisme yang sarat janji kesenangan, kegairahan, dan ekstasi. Giddens (2002: 76) mengingatkan, politik jalan ketiga dalam masyarakat di mana tradisi dan adat istiadat ketulungan pegangan, satu-satunya jalan jalan ke arah pembentukan otoritas adalah melalui demokrasi. Individualisme baru tidak serta merta mengikis otoritas, tetapi menuntut agar otoritas ditetapkan secara aktif atau partisipatif.

2. Terjalinnnya harmonisasi relasi sosial kultural antara *state, society, dan market* dalam pemberdayaan modal budaya menjadi daya tarik wisata

Pada tahun 1987, *World Comizion Environment Development (WCED)* mencetuskan konsep "*Sustainable Tourism*". Konsep ini kemudian dalam implementasinya lebih ditegaskan menjadi "*Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan Berkelanjutan*" (*Sustainable Tourism Community Based Development*). Seperti diuraikan dalam "*A Guidebook for Tourism-Based Community Development*" yang diterbitkan oleh *Asia Pacific Tourism Exchange Center* langkah awal pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan harus dimulai dari rasa "cinta (*love*) kepada rakyat" — *love is the underlying requirement for community development. Tourism-based*

community development also starts with love for the community. (APTEC:2001: 24).

Dengan cinta yang tulus kepada masyarakat, memasuki abad ke 21 kita berharap dunia pariwisata bisa lebih baik dari sebelumnya, khususnya dapat memberi kontribusi di bidang ekonomi, menambah lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal maupun internasional. Pembangunan pariwisata yang mengutamakan partisipasi penuh masyarakat dan hubungan harmonis, memberi perhatian besar pada upaya melestarikan sumber daya alam dan budaya untuk generasi mendatang yang merupakan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan sistem pembangunan berkelanjutan, kita dapat mengelola asset yang dimiliki untuk mencapai keuntungan demi masa depan anak cucu. Karena itu, pembangunan ini harus melibatkan masyarakat dari awal perencanaan, mendapat persetujuan dari seluruh anggota masyarakat, sehingga tercipta persamaan visi dan kesatuan langkah.

Sistem kepariwisataan Indonesia dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkesinambungan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara sesama manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis dengan menggunakan pendekatan ketahanan nasional.

Pariwisata kerakyatan dianggap penting (Ardika:2001), karena : (1) dapat memberdayakan masyarakat lokal, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain. Dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, (2) Pariwisata memberi keuntungan kepada masyarakat lokal. Masyarakat desa dan pendatang bisa bekerjasama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menarik pengunjung; (3) Pariwisata kerakyatan sekaligus sebagai upaya melestarikan keindahan alam, asset sejarah, melestarikan lingkungan hidup dan karakteristik warna lokal.

Menjaga asset daerah ini sangat riskan, mengingat jumlah kunjungan wisatawan yang diproyeksikan melonjak tajam dengan motivasi untuk mengisi waktu luang sehingga perhatian

ditekankan pada keinginan untuk memberikan yang terbaik kepada wisatawan. Karena itu perlu ada jaringan pengaturan lalu-lintas kunjungan wisatawan.

Bervariasinya motivasi orang berwisata menjadi perhatian dunia, karena berdasarkan pengalaman dan kecendrungan pasar yang mengeksploitasi sumber daya alam. Diversifikasi untuk memenuhi keinginan wisatawan dan mencapai target kunjungan membawa resiko rusaknya sumber daya alam, berubahnya lahan-lahan subur menjadi tempat tinggal atau sarana akomodasi pariwisata.

Pengembangan pariwisata kerakyatan berkonsentrasi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keinginan masyarakat. Aktifitas masyarakat lokal yang dipromosikan menjadi daya tarik dan menjadikan masyarakat sebagai pendukung utama dengan sumber daya alam, budaya, peninggalan sejarah, kegiatan industri, keramah-tamahan dan sumber daya masyarakat yang lain.

Faktor kunci pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan adalah terpeliharanya keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kepuasan wisatawan yang diberikan atas inisiatif masyarakat lokal. Sedangkan dalam sistem pembangunan pariwisata yang lain seperti pembangunan pariwisata konvensional tidak terjadi keseimbangan, banyak ditemukan konflik, seperti konflik antara lingkungan hidup dengan kepuasan wisatawan, konflik antara sumber daya dengan kepuasan wisatawan.

Berbeda dengan pembangunan pariwisata kerakyatan, dimana sumber daya alam yang bagus tidak mudah dijadikan obyek wisata jika pendatang atau pemilik modal tidak mampu mempresentasikan penggunaan sumber daya alam itu secara efektif, atau masyarakat lokal tidak sepenuhnya menghargai atau mempercayai apa yang mereka lakukan. Menurut Ardika, ada pun tolok ukur pariwisata berbasis kerakyatan adalah:

(1) *Meningkatnya rasa antusias masyarakat dalam pembangunan;*

Di mana perlu dibentuk suatu lembaga/ organisasi dan pembangunan sistem kolaborasi

dengan pemerintah. Maksudnya adalah penduduk lokal dan pemerintah berupaya membangun masyarakatnya, guna terjamin terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya serta dapat memberi kepuasan kepada wisatawan. Partisipasi penuh masyarakat dengan program yang realistis dan berkelanjutan adalah hal yang sangat penting dalam membangkitkan rasat antusiasme dan menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak pembangunan;

(2) *Terjaminnya Keberlanjutan Lingkungan hidup, sumber daya dan kepuasan wisatawan;*

Terjaminnya keberlanjutan lingkungan hidup/lingkungan fisik; di mana perlu dilakukan konservasi lingkungan fisik, promosi industri dan menciptakan aturan yang jelas. Maksudnya adalah tujuan utama pembangunan pariwisata kerakyatan adalah membangkitkan kekuatan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara seimbang. Secara ekonomis promosi industri pariwisata sangat penting, seperti promosi tentang hotel yang ada, jenis makanan dan minuman lokal yang dibuat, dan toko souvenir. Membantu bidang pertanian dan bidang lain yang berhubungan dengan industri pariwisata yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu harus diciptakan aturan yang jelas untuk mencegah rusaknya lingkungan akibat meningkatnya jumlah wisatawan, seperti upaya yang mungkin dapat memberitahu wisatawan agar tidak membuang sampah sembarangan atau berbuat onar. Perlu dibuat rute perjalanan yang jelas, ada areal yang tidak bisa diinjak sembarangan atau membuat perencanaan kawasan yang bisa digunakan wisatawan.

Di samping itu, terjaminnya keberlanjutan sumber daya; di mana harus menemukan sumber daya yang baru, meningkatkan nilai sumber daya yang dimiliki, serta menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya. Maksudnya di sinilah adalah pembangunan pariwisata kerakyatan harus berangkat dari penemuan kembali tentang keindahan alam, budaya dan sejarah masyarakat lokal. Pemahaman tentang sumber daya dan nilai-nilai masyarakat sangat penting disadari, bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Pemahaman inilah yang

memberi nilai tambah dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, seperti upaya menjadikannya *event* yang utama, membuat jenis souvenir baru dan memberi kesempatan kepada wisatawan ikut berpartisipasi dan mempelajarinya. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya, harus ada sistem yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Contohnya, harus ada kontrol tegas terhadap jalan masuk ke areal sumber daya tersebut sesuai dengan daya tampung yang dimiliki.

Harus mampu memberi pelayanan yang lebih baik, pengadaan informasi, dan kenyamanan perjalanan. Untuk menjamin kepuasan wisatawan, maka harus diciptakan kondisi yang baik, sehingga tempat itu nyaman untuk dikunjungi dan dinggalnya wisatawan. Keramah-tamahan dan pelayanan yang baik harus diberikan. Publikasi dan informasi salah satu kunci untuk menarik wisatawan. Demikian juga yang sangat penting adalah pengelolaan perjalanan agar tidak terjadi kemacetan dan masalah lain.

(3). Membangun sistem tentang keseimbangan lingkungan fisik masyarakat lokal dan kepuasan wisatawan;

Perlu menciptakan sistem informasi yang digunakan bersama-sama baik oleh pemerintah, penduduk lokal dan pengusaha industri pariwisata. Sistem informasi ini jika digunakan akan menjamin upaya kerjasama yang mendasar. Pemerintah daerah misalnya dapat memberikan konsep tentang pembangunan masyarakat yang komprehensif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan mengorganisir tentang promosi dalam suatu wadah bersama.

Perlu membangun sistem yang menguntungkan masyarakat lokal, di mana keuntungan secara ekonomis dari pariwisata harus diberikan kepada masyarakat lokal. Sistem ini dapat diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga seluruh anggota masyarakat merasa berbahagia dengan keuntungan tersebut. Demikian pula pemasukan dari jasa parkir, bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentu saja harus ada yang disisihkan untuk memelihara kelestarian sumber daya.

Perlu refleksi hasil monitoring, di mana keadaan lingkungan fisik, sumber daya, dan kepuasan wisatawan harus secara teratur dicek keberlanjutannya. Jika ditemukan masalah, maka masalah harus dipecahkan dan dilangi penataan sistemnya agar terjadi keseimbangan.

Dalam pembangunan pariwisata, peran serta dan keterlibatan masyarakat secara langsung, sehingga kepariwisataan nasional adalah pariwisata dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah disebut pariwisata kerakyatan. Hubungan secara vertikal manusia dengan Tuhan menempatkan nilai-nilai agama sebagai nilai tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Kepariwisataan memanfaatkan lingkungan baik berupa sumber daya alam maupun kondisi geografis, dengan selalu berupaya melaksanakan pelestarian. Kepariwisataan nasional yang bertumpu pada masyarakat sebagai kekuatan dasar, maka kepariwisataan bertumpu pada semua aspek kehidupan masyarakat yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sedangkan kekuatan inti untuk menggerakkan roda pembangunan pariwisata adalah unsur swasta (usaha pariwisata), media (pers) dan pemerintah. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan paling jauh hanya sebagai motivator, sedangkan swasta yang dibantu pers adalah merupakan pelaku-pelaku langsung kegiatan pariwisata. Konsep kepariwisataan yang dilaksanakan itu bersifat multidimensi, interdisipliner dan partisipatoris dalam suatu sistem yang utuh dan terpadu.

Pariwisata Budaya Bali Berbasis Kerakyatan Berkelanjutan

Sesungguhnya orang Bali sejak zaman dulu telah dibekali kearifan lokal hidup agar tidak melupakan masa lalu, hidup sejahtera hari ini, dan merencanakan masa depan yang lebih gemilang. Konsep ini disebut *atita (masa lalu)*, *wartamana (masa kini)* dan *nagata (masa depan)* yang diamalkan dalam bentuk *Panca Yadnya*. Adanya konsep *Dewa Yadnya* dan *Pitra Yadnya*, sesungguhnya mengandung nilai-nilai *bhakti* kepada Tuhan atas semua anugrah yang dilimpahkan dan penghormatan terhadap jasa dan

apa yang telah diperbuat para leluhur di masa lalu baik dalam bidang sosial, budaya, seni, arsitektur, dan lain-lain. Konsep *Bhuta Yadnya* dan *Manusa Yadnya* mengandung nilai agar manusia selalu hidup sejahtera dan harmonis dengan alam lingkungan serta seluruh makhluk. Sedangkan konsep *Rsi Yadnya* mengajak setiap orang agar terus berupaya belajar, merencanakan masa depan mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci yang ditulis oleh para *maha resi*, guru, dosen, para ahli, dan lain-lain.

Seirama dengan pendapat tokoh-tokoh teori postmodern dan teori sosial kritis, yang menekankan pentingnya masa lalu untuk kehidupan masa kini dan merancang masa depan, maka seluruh komponen pariwisata Bali dalam pembangunan pariwisata budaya yang berbasis kerakyatan hendaknya mampu mengimplementasikan konsep luhur orang Bali tersebut menuju *Sustainable Community Based Tourism*.

Peranan pemerintah dalam hal ini, sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, UU RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta amanat GBHN Tahun 1999 di mana misi pembangunan yang ingin dicapai antara lain adalah pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam, sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan paradigma baru "Pembangunan Pariwisata Budaya Berbasis Kerakyatan Berkelanjutan" (*Sustainable Community Tourism Development*) Pemerintah Daerah Bali lebih banyak berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Sedangkan masyarakat sekarang memiliki kesempatan yang semakin luas untuk berperan serta membangun dan mempertahankan desanya sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan.

Kendali otonomi daerah sebaiknya berada di tingkat propinsi untuk mengatasi kesenjangan pendapatan daerah masing-masing kabupaten/kota dari sektor pariwisata. Di samping itu, juga

menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota madya di Bali, seperti fenomena yang muncul belakangan ini di mana tiap daerah kabupaten/kota madya berebut investor untuk mengembangkan daerahnya masing-masing tanpa koordinasi dengan pemerintah propinsi. Akibatnya banyak kasus pembangunan sarana pariwisata tidak sesuai dengan kebijakan tata ruang dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan Pemda Bali. Yang sangat mengkhawatirkan, muncul wacana dan polemik untuk saling memblokir jalan-jalan menuju obyek wisata di kabupaten yang kurang mendapat kucuran dollar wisatawan.

3. Suatu Studi Kasus Pemberdayaan Modal Budaya *Desa Adat Kuta* dalam Hegemoni Politik Pariwisata

Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang dijadikan tempat penelitian, merupakan destinasi wisata yang paling awal berkembang di Bali secara spektakuler, tidak bisa lepas dari dampak industri pariwisata massa atau *mass tourism*. Perubahan besar terjadi sejak diresmikannya Pelabuhan Udara Tuban oleh Presiden Soeharto tahun 1967. *Desa Adat Kuta* menggeliat sebagai destinasi wisata favorit (Picard: 2006), selain pantainya dikunjungi banyak wisatawan untuk melakukan aktivitas *sea, sand, dan sun* yang murah, lingkungannya juga kemudian berkembang dengan pembangunan hotel-hotel berbintang, restoran, dan sarana penunjang lain seperti *souvenir shop* atau *night club*. Dalam observasinya di Kuta, Mabbet (1987 dalam Pitana: 1999: 83), menyatakan bahwa secara sepintas Kuta telah kehilangan "ke-Bali-annya".

Pantai Kuta misalnya, pada awalnya tempat untuk melaksanakan ritual *melasti* bagi *krama Desa Adat Kuta*, kemudian berkembang menjadi obyek wisata yang secara bebas dikunjungi wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan Nusantara. Tempat-tempat sekitar pantai juga telah banyak berubah menjadi sarana akomodasi pariwisata. Kuta tumbuh sebagai "desa dunia/desa wisata" yang memiliki pantai berpasir putih menjadi impian wisatawan. Pada siang hari wisatawan bisa seharian bermain-main dengan

ombak, kemudian berjemur mengintip matahari tropis yang terik. Sedangkan pada malam hari wisatawan menghabiskan waktunya di bar, restoran, atau kafe-kafe untuk makan dan minum serta bersantai. Kawasan Kuta menjadi titik temu banyak wisatawan yang berkunjung dalam waktu relatif singkat, satu minggu hingga satu bulan (Sulistyo, 2002:7-9).

Modal budaya *Desa Adat Kuta* yang menjadi kajian dalam penelitian ini tentu saja tidak bisa lepas dari konsepsi *Tri Hita Karana* yang melandasi kehidupan *krama desa adat* untuk bisa menjawab permasalahan mengapa *krama desa* adaptasi bisa bertahan dengan tradisinya di tengah hegemoni pariwisata. Ritual agama seperti *Melasti* misalnya, yang dilaksanakan di Pantai Kuta menjadi daya tarik wisata merupakan unsur *parahyangan* di mana prosesnya tampak sangat spektakuler dan menjadi tontonan wisatawan mancanegara pada sore hari menjelang matahari tenggelam. Pada saat bersamaan di pantai Kuta sedang dipenuhi para wisatawan yang melakukan aktivitas *sun set* di pantai, mengintip debur ombak bermahkotakan cahaya kemerahan matahari yang perlahan memasuki peraduannya di ufuk barat. Demikian pula prosesi ritual *Tawur Kesanga* di *catur pata* (perempatan jalan) berjalan dengan khidmat, meskipun lalu-lintas sangat ramai dan wisatawan banyak yang lalu-lalang. Prosesi *pengerupukan* pada petang hari yang diwarnai dengan pawai "*Ogoh-ogoh*" (patung raksasa) sebagai simbol kekuatan negatif yang harus *disomiakan* (dinetralisir) sehingga tidak mengganggu kehidupan manusia juga dijadikan tontonan bagi wisatawan. Kreativitas pelaku pawai "*Ogoh-ogoh*" yang semuanya *sekeha teruna* (anak-anak muda), dalam perspektif *Culture Studies*, menurut Barker (2005) merupakan "konsumsi kreatif" subkultur anak muda. Kreativitas seni metamorphosis ini menurut Strinati (2003) juga merupakan bagian dari budaya populer yang saling berkaitan dengan budaya massa.

Dari unsur *pawongan dan palemahan*, akan dilihat apakah telah terjalin harmonisasi antara *society, state, dan market* dalam hegemoni pariwisata di *Desa Adat Kuta*. Kemudian juga dilihat apakah terjadi transformasi sosial dalam pemberdayaan modal budaya *Desa Adat Kuta*

sebagai daya tarik wisata di tengah hegemoni pariwisata. *Krama Desa Adat Kuta* yang terhegemoni oleh dinamika pariwisata mengapa dapat beradaptasi sehingga bisa eksis dengan tradisi *menyamabraya, paras-paras, sagilik, saguluk, salung sabayantaka*. Apakah mereka bisa melaksanakan ritual *Melasti, Tawur Kesanga, Ngerupuk, dan Nyepi* dengan baik? Apakah suasana saat puncak hari suci *Nyepi*, dimana *krama desa* dan wisatawan dapat mematuhi *catur brata penyepian* (empat tata tertib *Nyepi*) yakni tidak bekerja, tidak bepergian keluar rumah/hotel, tidak mengadakan acara hiburan, dan tidak menyalakan api/lampu selama 24 jam?. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, apakah ada di antara *krama desa* yang termarginalkan dalam dinamika pariwisata?

Dari hasil penelitian awal di *Desa Adat Kuta* diketahui, hegemoni pariwisata bisa berjalan karena masyarakat meyakini pariwisata dapat meningkatkan taraf hidupnya. Mereka tidak memiliki sumber daya selain pantai yang indah dan budaya untuk dijadikan modal dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kuta. Menurut mereka, semakin bagus pantai serta modal budaya dipelihara dan dikelola, maka keberlanjutan pariwisata di *Desa Adat Kuta* akan terjamin.

Mereka pun mengakui, telah terjadi transformasi sosial dalam kehidupan *krama desa* adaptasi Kuta, akibat hegemoni pariwisata. Mereka tidak malu menyatakan, di balik gemerlap dinamika pariwisata dan asumsi orang luar tentang meningkatnya taraf perekonomian masyarakat, ternyata ada *krama desa Adat Kuta* yang terpinggirkan dan hidup miskin.

Untuk menangkal dampak negatif budaya pariwisata, mereka dengan sadar mengamalkan kearifan lokalnya yang disebut *wiveka, pangloika* atau *pangrasa*, membedakan yang baik dan buruk sesuai tuntunan rasa, hati nurani. "Kanti jelas bisa membedakan, yang mana kepentingan religius dan yang mana boleh dinikmati wisatawan," kata *Bendesa Adat Kuta*, I Gusti Ketut Sudira dan mantan *Bendesa Adat Kuta*, I Made Wendra, didampingi pengurus bagian *Parahyangan* (keagamaan), I Nyoman Jesna Astawa.

Krama (warga) Kuta, menurutnya tetap mampu memilah-milah antara kepentingan *state* atau pemerintah dengan kebijakan “pariwisata budaya”, kepentingan *market* atau pasar pariwisata yang harus tetap kompetitif, dan kepentingan *society*, dimana masyarakat Kuta bertekad menjaga jati dirinya, identitas, atau *local genius*. Seperti prosesi *Melasti* yang secara religius bermakna *angamet tirtha amertha ring tengahing segara* (mengambil air suci di tengah lautan) untuk kemudian dipercikkan kepada penduduk dan lingkungannya, jelas tidak boleh dirusak oleh budaya pariwisata. Demikian pula keheningan dan kesucian *Nyepi*, tidak boleh ternoda oleh gaya hidup atau *life style tourism*. Tampaknya, hegemoni pariwisata membuat *krama Desa Adat* Kuta mengalami negosiasi makna dalam setiap simbol yang dimiliki untuk mempertahankan kredibilitasnya di tengah hegemoni pariwisata. Abdullah (2006) menyebut fenomena semacam ini sebagai upaya memahami kebudayaan bukan sebagai kebudayaan generik, tetapi sebagai kebudayaan diferensial, kebudayaan yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial.

III. SIMPULAN

Pembangunan kepariwisataan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan, bertumpu pada keunikan, kekhasan dan kelokalan budaya suatu daerah.

Bali mengembangkan pariwisata budaya yang dalam implementasinya menonjolkan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, sehingga mengandung pembatasan bahwa segala sesuatu yang bertentangan, merusak maupun melunturkan nilai-nilai budi nurani budaya yang luhur dan merusak lingkungan alam harus dilarang. Hal ini sesuai pula dengan paradigma baru pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan, sehingga dalam pelaksanaannya harus didukung dengan rasa cinta yang tulus oleh semua pihak, seluruh komponen pariwisata. Dengan demikian akan lahir pariwisata yang mencintai masyarakat dan dicintai oleh masyarakat.

Berbagai upaya bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

membangun pariwisata budaya Bali berbasis kerakyatan berkelanjutan, baik peranserta secara swadaya, kemitraan, maupun pendampingan. Sedangkan peranan pemerintah hanya sebagai fasilitator, koordinator, dan mediator. Sejalan dengan era otonomi daerah, baiknya otonomi dikedalikan di tingkat propinsi, sehingga terjamin adanya pemerataan pembangunan kepariwisataan untuk seluruh kabupaten dan kota madya di Bali.

Seirama dengan pendapat tokoh-tokoh teori postmodern dan teori sosial kritis, yang menekankan pentingnya masa lalu untuk kehidupan masa kini dan merancang masa depan, maka seluruh komponen pariwisata Bali dalam pembangunan pariwisata budaya yang berbasis kerakyatan hendaknya mampu mengimplementasikan konsep luhur orang Bali tersebut menuju *Sustainable Community Based Tourism*. Hal ini akan mudah diwujudkan jika mampu mengaktualisasikan nilai-nilai hidup orang Bali yang terakumulasi dalam konsep *atita, wartamana, nagata* dan diwujudkan dalam *Panca Yadnya: Dewa Yadnya, Bhuta Yadnya, Manusa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya*.

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan pemahaman untuk menjernihkan eksistensi aspek produktif kebudayaan yang menitikberatkan kebudayaan sebagai “pedoman” dalam adaptasi serta kelangsungan hidup, dan aspek reproduktif kebudayaan yang menjadi kecendrungan baru dalam perubahan-perubahan masyarakat kontemporer akibat ideologi pasar pariwisata, seperti yang terjadi di Desa Adat Kuta, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Pada akhirnya, pemahaman ini akan bermuara pada terbangunnya harmonisasi antara *state, society, dan market* dalam perkembangan pariwisata yang berkelanjutan berbasis kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Adeney, Bernard T, 2000, *Etika Sosial Lintas Budaya*, Kanisius: Yogyakarta

- Ardika, I Wayan, 1999: *Pelestarian dan Pemanfaatan Tinggalan Arkeologi dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali*, artikel dalam Majalah Ilmiah Pariwisata, Volume 2, Tahun 1999, Penerbit: Program Studi Pariwisata Universitas Udayana.
- Ardika, I Wayan, 2001: *Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya*, Makalah disampaikan pada Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata Unud Tahun 2001/2002, Agustus 2002.
- , 2003, “Komponen Budaya Bali sebagai Daya Tarik Wisata”. I Wayan Ardika Penyunting. *Pariwisata Budaya Berkelanjutan, Refleksi dan Harapan di Tengah Perkembangan Global*, Denpasar, Program Studi Magister (S2) Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
- , 2006, “Prinsip Multikultural dan Implementasinya”, naskah lengkap Materi kuliah Anfulen, Denpasar, Universitas Udayana, 22-29 Agustus.
- , 2006, “Prinsip Multikultural dan Implementasinya”, Denpasar, materi kuliah Program S3 Univeristas Udayana.
- , 2006, “Cultural Linkages And Tourism Development Among Indonesia, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, dan Vietnam”, naskah lengkap yang disampaikan dalam International Symposium Trail of Civilization, 28 Agustus: Yogyakarta.
- Ardika, I Gede, 2001: *Pembangunan Pariwisata Bali Berkelanjutan yang Berbasis Kerakyatan*, Makalah pada Seminar Nasional Bali, *The Last or The Lost Paradise*, di Denpasar, 1 Desember 2001.
- Atmaja, Bawa Nengah, 2001: *Aspek Sosiokultural dalam Pengembangan Wisata Alam*, Makalah disampaikan pada kegiatan Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata UNUD Tahun 2001/2002, tanggal 22 Agustus 2001.
- Ady, Nyoman Rutha, 2006, “Kuta Dulu dan Kini: Loloan pun Disulap Jadi Hotel”, naskah lengkap opini, Denpasar, Bali Post
- Agger, Ben, 2006, *Teori Sosial Kritis, Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Atmaja, Nengah Bawa, 2006, “Pemulihan Krisis Kebangsaan dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kajian Budaya”, makalah pada Seminar Nasional Program Kajian Budaya Universitas Udayana, di Denpasar, 18 Nopember.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 2001. ‘Reformasi, Multikulturalisme, Dan Masalah Politik Bahasa di Indonesia’. Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Jawa III. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa.
- Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Bentang.
- Dherana, Tjokorda Raka, 1982: *Aspek Sosial Budaya dalam Kepariwisataan di Bali*, Penerbit: UP. Visva Vira Denpasar.
- Erawan, I Nyoman, 1999: *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Otonomi Daerah Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “ Otonomisasi daerah yang Diperluas dalam rangka Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Mandiri”, Denpasar 9 April 1999.
- , 2001: *Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata*, Makalah disampaikan pada kegiatan Matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata UNUD Tahun 2001/2002, tanggal 20 Agustus 2001.
- Elashmawi, Farid & Philip R. Harris, 1998: *Multicultural Essential Cultural Insights For Global Business Success Management 2000*, Gulf Publishing Company Houston: Texas.
- Gatner, William C., 1996: *Tourism Development, Principles, Processes, and Policies*, an International Thomson Publishing Company: London
- Featherstone, Mike, 2001, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Giddens, Anthony, 2000, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak*

- Kehidupan Kita*, Terjemahan Andry Kristiawan S dan Yustina Koen S, Jakarta: Gramedia
-, 2002, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, Terjemahan Keut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Harker, Richard, Cheelen Mahar, Chris Wilkes, 2006, *(Habitus X Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terjemahan Pipit Maizier, Yogyakarta: Jalasutra
- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Koentjaraningrat, 2000. *Bunga Rampal Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta : Gramedia
- Lastra, I Made, 1997, *Peraturan Kepariwisataaan*, Denpasar: STP Nusa Dua
- Lubis, Akhyar Yusuf, 2004, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Bogor: Akademia
- Piliang, Yasraf Amir, 2004, *Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta, : Jalasutra.
- Pitana, I Gde, 1994, Editor: *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar: BP
-, 1999, *Pelangi Pariwisata Bali*, Denpasar: BP
-, 2000: *Cultural Tourism in Bali, A Critical Appreciation*, Denpasar: Universitas Udayana Denpasar.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu.G. 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI
- Ratna Kutha, 2006, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Richards, Greg and Derek Hall, 2002, *Tourism and Sustainable Community Development*, London: Routledge
- Sirtha, I Nyoman, 2001, *Pariwisata dalam kaitannya dengan Sosiokultural Masyarakat Bali*, makalah disampaikan pada matrikulasi Program Studi Magister Kajian Pariwisata Unud, Tahun 2001/2002, tanggal 11 Agustus 2001.
-, 2001: *Bentuk-Bentuk Pola Kemitraan Desa Adat dan Industri Pariwisata di Kawasan Wisata Nusa Dua*, artikel dalam Majalah Dinamika Kebudayaan, No. 2 Tahun 2001, Penerbit: Lembaga Penelitian Universitas Udayana.
- Sulistyo, Hermawan (editor), 2002, *BOMBALI, Buku Putih Tidak Resmi Investigasi Teror Bom Bali*, Jakarta: Pusat Data CONCERN -324
- Swarsi, Geriya dan I Wayan Geriya, 2003, "Nilai Dasar dan Nilai Instrumental dalam Keragaman Kearifan Lokal Daerah Bali", makalah Dialog Budaya, Denpasar: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Bali.
- Tjatera, I Wayan, 2007, "Ekonomi dan Budaya", naskah mata kuliah *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Denpasar: Universitas Udayana
-, 2003, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesiatara
- Turner, Bryan S, 2006, *Agama dan Teori Sosial*, Yogyakarta: IRCiSoD
-, 2000, *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek -Aspek Agama Hindu* , Denpasar: Pemda Bali
-, 1999, *Ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004*, Jakarta: CV Tamita Utama
-, 2006, *Kumpulan Peraturan di Bidang Kepariwisataaan*, Denpasar: Dinas Pariwisata Provinsi Bali